



Peran *United Nations Development Programme* dalam Membantu Pemerintah Myanmar Menanggulangi Kemiskinan Tahun 2020-2022

Dwiki Prakarsya¹, Anastasia Wiwik Swastiwi², Sayed Fauzan Riyadi³

^{1,2,3}Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang,

Kepulauan Riau 29115; Telepon: (0771) 4500089

Email Korespondensi: dwiki.prakarsya@gmail.com

Abstract

This study describes the role of UNDP in the country of Myanmar in an effort to help overcome the problem of poverty. By providing various assistance in terms of economic, social, and political. In accordance with UNDP's goal of focusing on sustainable development. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Secondary Data Sources data collection techniques with observation. In this research, the parties involved are UNDP and the state of Myanmar through humanitarian organization relations. The results of this study indicate that the role played by UNDP is to support the recovery of micro and small businesses, rebuild local village infrastructure including water and energy, provide individual skills especially to improve the quality of human resources

Keywords: UNDP, Poverty, Myanmar

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan peran UNDP terhadap negara Myanmar dalam upaya membantu menanggulangi masalah kemiskinan. Dengan melakukan berbagai bantuan dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Sesuai dengan tujuan UNDP yaitu fokus terhadap pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Sumber Data Sekunder teknik pengumpulan data dengan observasi. Dalam penelitian ini yaitu pihak yang terlibat UNDP dan negara Myanmar melalui hubungan organisasi kemanusiaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan antara UNDP adalah dengan mendukung pemulihan usaha mikro dan kecil, pembangunan kembali Infrastruktur desa setempat termasuk air dan energi, memberikan keterampilan individu khususnya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Kata Kunci: UNDP, Kemiskinan, Myanmar

PENDAHULUAN

Salah satu negara berkembang yang memiliki tingkat ekonomi rendah berada di kawasan Asia Tenggara yaitu negara Myanmar, Menurut data Bank Dunia, kemiskinan di Myanmar turun dari 48 % menjadi 25 % antara 2005 dan 2017. Kemiskinan di Myanmar diprediksi akan naik pada 2022 sebagai dampak dari kudeta militer dan Covid-19. Kudeta di Myanmar dimulai pada 1 Februari 2021. Pihak militer merebut kekuasaan dari pemerintahan Aung San Suu Kyi. Akibatnya, terjadi gejolak politik dan ekonomi. PBB memperkirakan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat berlipat ganda menjadi 46,3 % dari

Received Maret 10, 2023; Revised April 20, 2023; Accepted Mei 27, 2023

* Dwiki Prakarsya1, dwiki.prakarsya@gmail.com

24,8 %. Kemiskinan perkotaan diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat pada 2022 menjadi 37,2 %, dibandingkan 11,3 % pada 2019 (Laily, 2022).

Myanmar adalah negara yang terletak di Asia Tenggara yang terkenal dengan isu pelanggaran HAM dan juga demokrasi, pemerintahan junta militer yang dikenal dengan sebutan *The State Peace and Development Council* (SPDC). SPDC merupakan perubahan dari *State Law and Order Restoration Council* (SLORC) sejak tanggal 18 September 1997. Junta militer telah berkuasa di Myanmar sejak terjadinya kudeta militer oleh Jenderal Ne Win terhadap pemerintahan sipil yang saat itu dipimpin oleh U Nu pada tahun 1962 sampai Jenderal Than Shwe. Jenderal Than Shwe mulai mengambil posisi kepemimpinan di Myanmar dimulai sejak tahun 1992 sampai dengan perubahan konstitusi baru dibuat pada tahun 2008.

Ketika dalam penguasaannya, kebijakan Kudeta militer tetaplah sama, yakni menghilangkan nilai-nilai demokrasi dan menggantikannya dengan tatanan yang bersifat sentralistik dan otoriter. Nilai-nilai demokrasi yang telah diabaikan junta militer tersebut menyebabkan pelanggaran HAM menjadi hal biasa di Myanmar, yang pada akhirnya pihak sipil hanyalah sebagai penonton dan tidak terlibat menciptakan demokrasi partisipatoris. Demokrasi di Myanmar dapat dianggap sebagai demokrasi yang mengalami kebekuan atau stagnan. Artinya terdapat penerapan demokrasi, namun semangat demokrasi yang seharusnya memberikan kebebasan serta peran utama kepada pihak sipil menjadi tidak ada (Mirajiah, 2013).

Begitu juga dengan Myanmar, proses bernegara yang dialami oleh Myanmar tentu mengalami pasang surut dalam terjadinya perubahan dan perkembangan di dalam negaranya. Selain adanya perkembangan dan perubahan demi perubahan, juga ditandai dengan gejolak, baik dalam berbeberapa segi maupun segi ekonomi itu sendiri (Rahmi, 2022). Myanmar dikejutkan oleh penggulingan militer atas pemerintah yang dipilih secara demokratis pada 1 Februari 2021. Dalam dua bulan, konflik tersebut telah merenggut lebih dari 700 nyawa dan berdampak pada keselamatan. dan kesejahteraan (UNDP, 2021).

Bahkan berbagai desakan muncul atas pelanggaran HAM tersebut. Desakan dan ancaman internasional atas Myanmar ini secara tidak langsung membawa dampak buruk bagi situasi dan kondisi yang berada di dalam negeri Myanmar itu sendiri. Dampak dari sanksi ekonomi negara-negara Barat seperti, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) selama 20 tahun lebih telah membuat perekonomian di Myanmar semakin tidak berkembang dan terpuruk (Mirajiah, 2013).

Tabel 1.1
Dampak Pengambilalihan Militer

Sumber Pendapatan	Sektor Yang Berdampak
Upah (remunerasi untuk pekerja)	pertambangan dan penggalian, industri makanan, minuman dan hasil tembakau, industri garmen, industri logam dasar perdagangan, perdagangan eceran, pengangkutan dan penyimpanan, akomodasi, kegiatan keuangan dan asuransi, kegiatan real estat
Pendapatan usaha non pertanian (Pendapatan dari wirausaha non pertanian dan kepemilikan usaha)	pertambangan dan penggalian, industri makanan, minuman dan hasil tembakau, industri garmen, industri logam dasar, perdagangan, perdagangan eceran, pengangkutan dan penyimpanan, Akomodasi, kegiatan keuangan dan asuransi, kegiatan real estat.
Remittance (uang yang diterima dari non-anggota rumah tangga)	Sedikit terpengaruh karena masalah dengan sektor perbankan di Myanmar.
Tanaman/pertanian/produksi air (pendapatan dari: produksi tanaman dan kehutanan, pemeliharaan ternak, perikanan dan budidaya lainnya)	Sedikit terpengaruh karena tantangan yang dialami petani.
Transfer sosial	Agak terpengaruh karena pembangkangan sipil yang sedang berlangsung dan gangguan dalam pelaksanaan beberapa transfer sosial.

Sumber: UNDP, 2021.

Sebuah penilaian dari lembaga internasional tersebut telah cukup menambah beban panjang bagi Myanmar dalam hal pembangunan ekonomi, dimana pada tahun 2009 UNDP menggolongkan Myanmar masuk dalam kategori tingkat perekonomian atau pendapatan domestik dikawasan Asia Tenggara, khususnya Myanmar yang mengalami pendapatan ekonomi yang rendah, tersebut disebabkan pada umumnya karena adanya ketidak-adilan ekonomi oleh penguasa junta militer sebagai kelompok mayoritas etnis Burma (Mirajiah, 2013).

Persoalan ketidakadilan ekonomi sebenarnya telah berlangsung lama di kalangan etnis minoritas yang mengalami dikriminasi ekonomi. Sebuah kegagalan ekonomi dari kebijakan nasionalisasi yang dijalankan pemerintahan junta militer tahun 1960an juga telah menjadi permasalahan umum di kalangan masyarakat Myanmar (Mirajiah, 2013).

Selain itu juga pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Hingga Agustus 2020, Myanmar memiliki tingkat infeksi virus corona terendah di Asia Timur dan wilayah pasifik, meskipun ini mungkin terkait dengan fasilitas pengujian sederhana yang tersedia. Namun, kasus yang tercatat melonjak menjelang kuartal keempat yang memungkinkan sebagian karena peningkatkan pengujian. Secara garis besar,

rangkaian tindakan pencegahan dan mitigasi yang dilakukan pemerintah sejak Februari 2020 berhasil mengendalikan penyebaran virus tersebut. Namun, mereka juga menyebabkan gangguan dalam operasi bisnis (UNDP, 2021).

Toko-toko ritel serta perusahaan manufaktur menderita gangguan rantai pasokan yang meluas, membuat beberapa bidang ekonomi dan perdagangan hampir terhenti. Selain itu, pada Desember 2020 lebih dari 420.000 migran telah kembali dari luar negeri. Terakhir, dampak ekonomi regional dan global dari COVID-19 telah mengurangi permintaan ekspor Myanmar, memberikan efek lanjutan lebih lanjut pada perekonomian (UNDP, 2021)

Krisis politik yang sedang berlangsung, semakin menambah dampak sosial ekonomi dari pandemi, mengurangi pendapatan. Dalam skenario terburuk, hampir separuh penduduk Myanmar (48,2 persen) akan hidup dalam kemiskinan (dibandingkan dengan 24,8 persen pada tahun 2017), membalikkan pencapaian yang dicapai sejak tahun 2005. Jika situasi di lapangan berlanjut, tingkat kemiskinan dapat dua kali lipat pada awal tahun 2022. Pada saat itu, guncangan krisis akan mengakibatkan hilangnya upah dan pendapatan secara signifikan, terutama dari usaha kecil, dan penurunan akses ke makan (UNDP, 2022c).

Sebagai salah satu organisasi internasional yang berkonsentrasi dalam suatu pembangunan dan pertumbuhan memberantas kemiskinan *United Nations Development Programme* Sebagai badan utama PBB untuk pembangunan internasional bekerja di 170 negara dan wilayah untuk memberantas kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan. Membantu negara-negara untuk mengembangkan kebijakan, keterampilan kepemimpinan, kemampuan bermitra, kemampuan kelembagaan, dan membangun ketahanan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (UNDP, 2022a)

UNDP dibentuk pada tahun 1965 sebagai penggabungan dua organisasi sebelumnya (Program Bantuan Teknis PBB dan Program Dana Khusus PBB). *United Nations Development Programme* (UNDP) UNDP adalah jaringan pembangunan global PBB, sebuah organisasi advokasi untuk perubahan dan menghubungkan negara-negara ke pengetahuan, pengalaman dan sumber daya untuk membantu masyarakat membangun kehidupan yang lebih baik. UNDP berada di 166 negara, pusat kegiatannya di New York untuk membantu dan memberikan solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional dan global.

United Nations Development Programme terkonsentrasi di tiga area fokus; pembangunan berkelanjutan, pemerintahan demokratis dan pembangunan perdamaian, serta ketahanan iklim dan bencana. Mandat *United Nations Development Programme* adalah untuk mengakhiri kemiskinan, membangun pemerintahan yang demokratis, supremasi hukum, dan institusi yang inklusif juga mengadvokasi perubahan, dan menghubungkan negara dengan pengetahuan,

pengalaman, dan sumber daya untuk membantu orang membangun kehidupan yang lebih baik (UNDP, 2022b)

Sebagai badan utama PBB untuk pembangunan internasional, UNDP bekerja di 170 negara dan wilayah untuk memberantas kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan. UNDP membantu negara-negara untuk mengembangkan kebijakan, keterampilan kepemimpinan, kemampuan bermitra, kemampuan kelembagaan, dan membangun ketahanan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. UNDP terkonsentrasi di tiga area fokus; pembangunan berkelanjutan, pemerintahan demokratis dan pembangunan perdamaian, serta ketahanan iklim dan bencana (UNDP, 2022b).

Melihat krisis ekonomi di negara Myanmar yang disebabkan oleh konflik berkelanjutan juga pandemi covid-19 yang terjadi 2 tahun terakhir peran Aktor internasional pun sangat penting untuk dilibatkan dalam membantu juga meringankan permasalahan yang terjadi, aktor internasional dalam hal ini adalah organisasi internasional atau dalam hal ini adalah *United Nations Development Programme* yang sesuai dengan tujuan dan mandatnya maka dari itu peneliti tertarik untuk menganalisis peran apa yang akan dilakukan oleh *United Nations Development Programme* dalam membantu pemerintah myanmar menanggulangi kemiskinan di negara Myanmar.

Berdasarkan latar belakang yang diteliti oleh peneliti, bagaimana peran aktor internasional dalam hal ini adalah UNDP dalam membantu negara Myanmar untuk menanggulangi kemiskinan di negara Myanmar. Dengan tujuan penelitian, mengetahui peran apa yang dilakukan oleh UNDP sebagai organisasi internasional dalam membantu pemerintah myanmar menanggulangi kemiskinan di negaranya.

METODE PENELITIAN

Guna memberikan dampak dan penyertaan yang kuat terkait penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan penelitian ini secara deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2012). Objek penelitian dan fokus dari penelitian ini adalah tertarik dengan konflik dan peristiwa yang terjadi di Myanmar serta subjek dalam penelitian ini yaitu Organisasi UNDP, dan Lokasi Penelitian yaitu Negara Myanmar. Dalam penelitian ini, dilakukan secara sekunder dengan menganalisis lebih lanjut hasil literatur yang ditemukan oleh peneliti, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara observasi. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan reduksi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dari International Monetary Fund (IMF), Myanmar memiliki PDB per kapita yang disesuaikan dengan PPP sebesar \$4,968 di tahun 2020, menunjukkan tren positif dan peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya \$4,848 di tahun 2019 (IMF, 2021) akan tetapi Myanmar tetap masuk dalam kategori sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah. Negara ini menempati peringkat ke -165 dalam Indeks Kemudahan Berbisnis 2020 Bank Dunia.

Berdasarkan data dari Fragile State Index tahun 2021, Myanmar menempati urutan ke 23 dari 179 negara sebagai negara yang rentan yang memiliki skor 93,8 dari skor tertinggi 120. Dalam sektor ekonomi, angka indikator Myanmar mengalami kemunduran ekonomi yang berada di angka 4.80, angka tersebut menunjukkan peningkatan dibanding dengan tahun 2020 yaitu 5.00, juga sama dibandingkan dengan beberapa tahun kebelakang. Angka indikator kemunduran ekonomi Myanmar pada tahun 2021 dapat dikatakan membaik (Country Dashboard | Fragile States Index, 2021)

Secara garis besar Indeks Negara Rapuh Myanmar mengalami peningkatan, perubahan poin sebanyak -0.2 dibanding tahun 2020, 2.5 dibanding 5 tahun kebelakang dan -4.5 poin dibanding 10 tahun kebelakang. Berdasarkan data dari hasil riset yang ditulis oleh The Centre for Economics and Business Research pada tahun 2020, di dalam riset terbarunya yang berjudul World Economic Table League yang berisi prediksi dan analisa pertumbuhan ekonomi dari 197 negara, hasil riset ini menyatakan bahwa Myanmar menempati urutan ke 69 di tahun 2020 dan diprediksi naik tingkatan lebih tinggi pada tahun 2035 (Widigdo & Rofii, 2022).

Akibat dari adanya kudeta militer menimbulkan situasi dan kondisi nasional tidak stabil, ketidakstabilan keamanan, sosial dan politik Myanmar. Masyarakat Myanmar menyatakan tidak ingin dipimpin oleh pemerintahan militer seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Myanmar memiliki catatan sejarah yang panjang terhadap adanya rezim militer yang juga diawali oleh kudeta militer sebelumnya, terdapat sejumlah kekerasan yang terjadi secara berulang dan absennya demokrasi selama kurun waktu pemerintahan militer dari tahun 1962-2011 (Widigdo & Rofii, 2022).

Berdasarkan salah satu jurnal yang meneliti mengenai keadaan ekonomi di bawah junta militer di tahun-tahun sebelumnya menyatakan bahwa junta militer lebih mengutamakan pertumbuhan dari pada demokratisasi, hasil studi tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 3 (tiga) dekade stabilitas dan disiplin yang di pertahankan dengan kekerasan di Burma

oleh rezim militer berturut turut belum menghasilkan pertumbuhan ekonomi bagi rakyat (Maung, 1996)

A. UPAYA MYANMAR DENGAN ADANYA KEBIJAKAN PBB LEWAT UNDP MENGAKOMODIR KEPENTINGAN MYANMAR

Upaya yang dilakukan Myanmar dengan adanya Kebijakan PBB lewat UNDP Mengakomodir Kepentingan Myanmar Semenjak berkuasanya pemerintah junta militer Myanmar, kebebasan politik dan demokrasi masyarakat Myanmar dikekang. Penguasaan penuh negara beserta sendi-sendi kehidupan masyarakat Myanmar oleh pemerintah junta militer, telah menimbulkan keprihatinan dunia internasional, salah satunya adalah PBB. Masalah HAM di Myanmar pun sebenarnya merupakan sebuah masalah yang sudah muncul semenjak pemerintah junta militer Myanmar berkuasa, salah satu aspek tindakan pemerintah junta militer Myanmar yang dianggap dunia internasional sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap HAM adalah tindakan pemerintah dalam mengatasi berbagai gelombang protes anti pemerintah serta berbagai aksi-aksi demonstrasi damai yang terus berlangsung hingga saat ini, mulai dari aksi yang diorganisir oleh mahasiswa, kelompok prodemokrasi, hingga aksi demonstrasi yang dipelopori oleh para biksu (Iskandar & Muslina, 2016).

PBB dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendorong penegakan HAM di Myanmar, yang didasarkan atas Universal Declaration of Human Rights beserta perjanjian dan traktat-traktat internasional yang mengikutinya. Dengan dasar tersebut maka PBB memiliki sebuah pandangan tersendiri dalam melihat situasi pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar yang secara jelas terlihat dari beberapa resolusi yang dikeluarkan oleh PBB hingga saat ini (Iskandar & Muslina, 2016).

B. UNDP MEMPERKUAT SISTEM PENDIDIKAN MYANMAR

Ketimpangan gender di bidang pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan antara kondisi gender sebagaimana yang dicitacitakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi objektif) di bidang pendidikan. Ketimpangan gender disebut juga permasalahan gender atau isu gender. Lebih lanjut kondisi normatif contohnya, kesempatan mengikuti pendidikan formal bagi laki-laki dan perempuan adalah sama. Ketimpangan gender dalam hal pendidikan tersebut telah dirasakan oleh negara yang puluhan tahun dipimpin oleh pemerintahan junta militer, yaitu Myanmar. Myanmar merupakan negara termiskin di Asia Tenggara, namun meskipun negara termiskin Myanmar merupakan negara yang paling kuat dalam kekuasaan junta militernya. Hal tersebut yang mengakibatkan banyaknya rakyat Myanmar yang menderita akibat kekuasaan junta militer.

Salah satunya di sektor pendidikan yang banyak mengalami diskriminasi dalam hal menempuh jenjang pendidikan ini. Dalam upaya mengurangi ketimpangan gender ini, UNDP Myanmar pada akhirnya melakukan sebuah program baru mengenai ketimpangan gender tersebut. Tujuan dari program Myanmar adalah untuk meningkatkan UNCT Gender Theme Group yang diketuai oleh UNDP untuk lebih mempromosikan kesetaraan gender secara efektif di Myanmar. Namun pada tanggal 2-3 Mei 2008, terjadi bencana Topan Nargis melanda Myanmar. Daerah yang secara signifikan tercakup dalam program IPM UNDP. Oleh karena itu, ruang gerak pada proyek ini dimodifikasi untuk lebih fokus pada realitas yang baru dari program IPM Myanmar. Secara efektif program ini menekankan peningkatan kesetaraan gender di daerah pedesaan, untuk pengarusutamaan gender dalam merespon keadaan yang darurat dan persiapan sejak dini.[2] Namun berdasarkan dengan program yang telah disusun oleh IPM UNDP tersebut, tidak sebanding dengan data laporan MDG yang menjadi trend tahun 2005-2010. Data MDG tersebut telah memperbaiki kondisi kehidupan pembangunan nasional yang ada di Myanmar. Bahkan terdapat beberapa indikator yang menunjukkan arah perubahan yang signifikan, namun ada juga indikator yang malah berbanding terbalik dengan program MDG selama ini (Iskandar & Muslina, 2016).

Pada dasarnya rasio jumlah anak perempuan ditingkat pendidikan dasar, atau biasa disebut Indeks Paritas Gender, merupakan rasio jumlah siswa perempuan yang terdaftar terhadap jumlah siswa laki-laki di sekolah dasar. Sedangkan indikator merupakan sebuah ukuran dari aksesibilitas pendidikan untuk seorang anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Secara keseluruhan menurut laporan Data MDG di Myanmar, rasio jumlah anak perempuan dalam menempuh pendidikan dasar tersebut menunjukkan penurunan dari 96,1% menjadi 92,6% antara 2005 dan 2010, dimana perubahan tersebut secara statistik tidak begitu signifikan.

Hal ini masih dipengaruhi oleh data yang menunjukkan lebih tinggi presentase anak perempuan miskin 96,7%, di bandingkan anak-anak yang tidak miskin yaitu sekitar 91%. Begitu juga dengan ukuran yang lebih tinggi di pedesaan sekitar 93,3% sedangkan perkotaan 89,9%. Jadi jika ditotalkan, perbandingan presentasi jumlah anak perempuan dalam menempuh pendidikan dilihat dari status kemiskinan dan strata mengalami penurunan dari tahun 2005-2010 sekitar 3.6%.[3] Begitupun dengan rasio tingkat paling terendah anak perempuan dalam pendidikan dasar di beberapa wilayah Myanmar seperti di Kayah (80.2%), Sagaing (82.3%), Mon (86%), dan Bago (86.6%). Kecenderungan penurunan ini ditemukan di kebanyakan wilayah Myanmar, meskipun perbedaan ini tidak signifikan secara statistik (Iskandar & Muslina, 2016).

C. PERAN UNDP DALAM PEMERINTAH MYANMAR MENANGGULANGI KEMISKINAN TAHUN 2020-2022

Pada akhir 2020, 83% pendapatan rumah tangga di Myanmar terpengkas hampir setengahnya karena pandemi, dan selama masa pandemi covid-19 berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat Myanmar hingga 11%. Ditambah lagi dengan krisis kemanusiaan di Myanmar dan juga pembangunan Myanmar yang buruk sejak Februari 2021 yang juga menyebabkan kenaikan tajam kemiskinan dinegara tersebut (Yangon, 2022). UNDP sebagai organisasi internasional yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, pemerintahan demokratis dan pembangunan perdamaian ikut ambil andil dalam membantu Myanmar dalam mengurangi kemiskinan di negaranya.

Kegiatan UNDP dibangun di atas sejarah panjang kemitraan dengan masyarakat sipil lokal dan organisasi berbasis komunitas yang berawal dari Proyek UNDP saat ini telah secara langsung menyediakan barang-barang penting untuk pertanian, perikanan, dan peningkatan akses ke pasar bagi masyarakat di 52 kotapraja di pedesaan Myanmar, beberapa daerah termiskin di Yangon, dan di Rakhine bersama UNHCR (UNDP, 2022c).

Selain itu, UNDP mendukung pemulihan usaha mikro dan kecil yang dikepalai perempuan, membangun kembali infrastruktur desa setempat termasuk air dan energi, dan memberikan pelatihan keterampilan bagi kaum muda untuk mendapatkan pekerjaan. UNDP menggunakan pendekatan pendampingan untuk memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil lokal yang juga berusaha membantu kelompok yang paling rentan (UNDP, 2022c).

UNDP juga bekerjasama dengan masyarakat sipil dengan memberikan pelatihan kritis dan dukungan keuangan, OMS merupakan salah satu mitra yang sekarang menawarkan bantuan hukum berbasis masyarakat yang lebih besar, misalnya untuk mengatasi masalah terkait tanah. Dalam situasi hak asasi manusia yang sangat sulit saat ini di Myanmar, meskipun dukungan ini tidak mungkin mengubah konteks keseluruhan, dukungan ini memang memberikan kelegaan bagi individu yang rentan yang mencoba mengamankan beberapa hak ekonomi yang paling mendasar.

UNDP sekarang bertujuan untuk meningkatkan pekerjaannya untuk menjangkau tujuh juta orang pada akhir tahun 2024, dengan terus memenuhi kebutuhan dasar dan membantu memulihkan atau membangun kembali sarana untuk mengejar mata pencarian, bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan US\$ 120 juta selama tahun 2023-2024. Salah satu kota di Myanmar yang menjadi fokus dari UNDP adalah Kota Rakhine dimana mayoritas dari kota tersebut adalah masyarakat Rohingnya.

D. SOROTAN DI RAKHINE

Bermitra dengan badan-badan PBB lainnya - telah mendukung kepulungan yang aman bagi para pengungsi dari 21 desa yang mengungsi akibat konflik bersenjata antara tahun 2018 dan 2020. Namun, kenyataannya rumah itu tidak seperti semula. UNDP memberikan 13.700 kantong benih padi kepada 8000 penduduk desa, 9,600 kantong pupuk kepada 6.600 penduduk desa, dan lebih dari 15.000 set alat tangkap, seperti jaringan ikan dan perangkap kepiting kepada 7.300 penduduk desa (UNDP, 2022b).

Intervensi penghidupan dirancang oleh masyarakat dengan dukungan dari organisasi masyarakat sipil. Rumah tangga yang paling rentan menjadi sasaran. Mereka menerima aset mata pencaharian pertanian dan perikanan, dengan pelatihan untuk mendukung nilai tambah dan hubungan pasar. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat mengakhiri ketergantungan mereka pada bantuan kemanusiaan dan jenis bantuan ad-hoc atau jangka pendek lainnya (UNDP, 2022b).

UNDP juga telah mengukur peningkatan nilai tambah dan akses pasar melalui pekerjaannya, seperti pengiriman tujuh kubah pengering surya tipe rumah kaca yang besar. Berkat akses ke kubah, petani lokal dan keluarga nelayan telah menghasilkan keuntungan lebih dari 600.000 kyat dengan menambahkan nilai pada tanaman dan hasil panen mereka serta berkontribusi pada pertumbuhan rantai nilai lokal. Petani juga menghadiri pameran pasar yang diselenggarakan oleh UNDP untuk menghubungkan produsen lokal dengan calon pembeli dan pedagang yang beroperasi di dan melalui Sittwe (UNDP, 2022b).

UNDP telah menjangkau 500.000 orang di seluruh kota di Rakhine dengan mata pencaharian dan peluang menghasilkan pendapatan. Dengan peningkatan investasi, UNDP berencana memperluas dukungannya ke 17 kota mandiri di Negara Bagian Rakhine, rumah bagi 3 juta orang. Dukungan tersebut akan mencakup proyek-proyek untuk meningkatkan inklusi ekonomi, kohesi sosial, dan perlindungan hak-hak dasar.

Negara Burma mempunyai hak untuk meminta bantuan teknis pada PBB melalui UNDP, dan hal tersebut dilakukan Burma pada awal tahun 1970 an, ketika Burma menyetujui upaya UNDP untuk melakukan rencana pembangunan selama 20 tahun, yang dibagi menjadi lima Rencana Empat Tahun (Four Year Plans). Saat itu diproyeksikan Burma akan mendapat bantuan dana sebesar 500 juta dollar Amerika selama pelaksanaan lima Rencana Empat Tahun tersebut. Rencana Empat Tahun itu sendiri mulai dilaksanakan pada Periode Pertama yaitu tahun 1973-1977 dan direncanakan selesai pada tahun 1989 (Iskandar & Muslina, 2016).

Rencana Empat Tahun itu sendiri dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh BSPP (Burma Socialist Programme Party), partai yang ketika

itu berkuasa di Burma. Perencanaan pada level makro dilakukan oleh Menteri Perencanaan dan Keuangan Burma, dan fungsi operasional diserahkan pada Departemen Perencanaan (Planning Department). Periode Pertama CPI (First Country Programme) bertujuan untuk membantu pemerintah Burma untuk melakukan riset sehubungan dengan perencanaan pendidikan, layanan kesehatan, perdagangan, ilmu kelautan dan berbagai teknologi mineral terbaru (Iskandar & Muslina, 2016).

E. PERAN UNDP MENURUT TEORI ORGANISASI INTERNASIONAL

Semakin baik komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, semakin sedikit kesalahan yang terjadi. Sulit untuk mencapai standar dan tujuan kebijakan tanpa kejelasan dan konsistensi serta kepatuhan terhadapnya. Dengan kejelasan ini, pelaksana kebijakan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Dalam organisasi publik, seperti pemerintah daerah, komunikasi seringkali merupakan proses yang sulit dan kompleks. Dalam hal ini merujuk pada koordinasi dan komunikasi antara pemerintah Kabupaten Lingga dengan para pelaku pelayanan sosial untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Organisasi internasional ini pun juga dilihat dari tugas maupun fungsi dari yang dilihat dari peran organisasi internasional dalam suatu sistem politik didunia. Penggolongan peran dari organisasi tersebut bisa dilakukan dengan suatu sistem di dalam organisasi tersebut (Archer, 2001). Terdapat tiga peran utama menurut Archer dalam bukunya yang berjudul *International Organisation* yang mengklasifikasikan organisasi internasional sebagai berikut (Archer, 2001).

- a. Organisasi internasional sebagai instrument dalam hal ini dimaksud bahwa organisasi internasional merupakan instrumen yang dijadikan alat bagi suatu negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini UNDP dijadikan alat oleh negara Myanmar untuk mendukung kemajuan pembangunan di negaranya lewat program-program bantuan yang dijalankan oleh UNDP terlihat dari banyaknya dukungan mata pencaharian yang telah tercapai di kota Rakhine yang dimana adalah kota yang rentan.
- b. Organisasi internasional juga memiliki peran arena peran, organisasi internasional dalam hal ini organisasi merupakan tempat atau wadah dari kegiatan yang akan diselenggarakan (Archer, 2001). Organisasi internasional tersebut dapat diartikan menjadi tempat bagi anggota organisasi internasional untuk berdiskusi (Archer, 2001). Dalam hal ini organisasi internasional sebagai tempat pertemuan untuk berkumpul dan juga bertukar pikiran. Dalam

hal ini UNDP menjalankan perannya yaitu sebagai organisasi internasional yang bergerak pada pembangunan berkelanjutan dengan beberapa program untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia hal ini dapat dilihat dari Selain itu, UNDP mendukung pemulihan usaha mikro dan kecil yang dikepalai perempuan, membangun kembali infrastruktur desa setempat termasuk air dan energi, dan memberikan pelatihan keterampilan bagi kaum muda untuk mendapatkan pekerjaan. UNDP menggunakan pendekatan pendampingan untuk memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil lokal yang juga berusaha membantu kelompok yang paling rentan (UNDP, 2022c).

UNDP juga bekerjasama dengan masyarakat sipil dengan memberikan pelatihan kritis dan dukungan keuangan, OMS merupakan salah satu mitra yang sekarang menawarkan bantuan hukum berbasis masyarakat yang lebih besar, misalnya untuk mengatasi masalah terkait tanah. Dalam situasi hak asasi manusia yang sangat sulit saat ini di Myanmar, meskipun dukungan ini tidak mungkin mengubah konteks keseluruhan, dukungan ini memang memberikan kelegaan bagi individu yang rentan yang mencoba mengamankan beberapa hak ekonomi yang paling mendasar.

KESIMPULAN

Dari berbagai konflik yang terjadi di negara Myanmar, mulai dari kudeta militer, konflik Rohingnya, sampai Pandemi Covid-19 yang menyebabkan keterpurukan situasi ekonomi, UNDP sebagai aktor internasional yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan pemberantas kemiskinan membantu negara Myanmar untuk mendorong pembangunan dan juga pemulihan ekonomi di negara Myanmar salah satunya di kota yang rentan seperti rokhine dimana UNDP mendukung pemulihan usaha mikro dan kecil yang dikepalai perempuan, membangun kembali infrastruktur desa setempat termasuk air dan energi, dan memberikan pelatihan keterampilan bagi kaum muda untuk mendapatkan pekerjaan.

Terlepas dari hal tersebut UNDP juga telah mampu bekerja sama dengan organisasi berbasis masyarakat dan berdampak pada kehidupan banyak orang, melalui pelatihan mata pencaharian, bantuan usaha mikro dan kecil, dan pembangunan ketahanan masyarakat (UNDP, 2022b). Titik awal UNDP adalah langsung ke komunitas yang paling rentan dan bekerja dengan mereka untuk mengidentifikasi kebutuhan paling kritis mereka.

Dari pemberian UNDP 13.700 kantong benih dapat mensejahterakan pertanian 30% masyarakat Myanmar dipertanian membantu pada aspek ekonomi. Juga pemberian 15.000 set alat tangkap jarring dan sebagainya sehingga berdampak positif hamper 25% masyarakat bekerja nelayan pesisir dapat terbantu dan meningkatkan hasil laut mereka.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini memberikan saran yaitu dalam Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDG's) Dalam Pengentasan Kemiskinan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Lingga sebaiknya program yang diberikan lebih terstruktur dan sumber daya yang tersedia lebih disiplin dalam menerapkan peraturan yang ada sehingga tidak terjadi kecurangan dalam pendataan penerima bantuan. Kemudian ada beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

Berdasarkan temuan diatas penulis berharap penelitian ini dapat memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Kajian ini masih jauh dari kata baik . namun berasarkan hasil penelitian ini, penulis menawarkan saran sementara untuk dijadikan evaluasi lebih lanjut.

- a. Melakukan penelitian lebih mendalam terkait wilayah-wilayah rentan di negara Myanmar.
- b. Melakukan penelitian lebih berfokus pada kehidupan masyarakat menengah kebawah di Burma
- c. Melakukan fokus penelitian terhadap wilayah perkotaan di Myanmar
- d. Melakukan fokus terhadap aspek peluang pekerjaan yang tersedia di Myanmar
- e. Melakukan fokus hubungan Myanmar terhadap negara Asia Tenggara maupun ASEAN
- f. Melakukan penelitian dari Myanmar terhadap potensi generasi muda selanjutnya.

Saran yang disimpulkan dari penulis melalui penelitian UNDP terkhusus pada kemiskinan adalah peneliti berharap agar undp lebih meningkatkan bantuannya pada negara terbelakang contoh seperti negara benua afrika sungguh perlu perhatian khusus. Seiring perubahan zaman peneliti berharap adanya upaya dari organisasi lain maupun negara besar atau maju untuk ikut andil guna membantu negara berkembang yang sedang mendapatkan permasalahan terkhusus ekonomi sosial politik dan budaya. Perlu adanya kedewasaan kedadaran kemanusiaan perlu ditingkatkan dari setiap komponen organisasi serta negara itu sendiri agar tercapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan negara maupun bangsa.

REFERENSI

- Archer, C. (2001). *International Organisation*. Psychology Press.
- Iskandar, I., & Muslina. (2016). Upaya UNDP (United Nations Development Programme) dalam Memajukan Demokrasi di Myanmar. *JOM FISIP*, 3(2).
- Laily, I. N. (2022). *10 Negara Termiskin di Asia, Afganistan Ada di Peringkat Pertama*. Katadata.
- Mirajiah, R. (2013). Faktor Eksternal dan Internal Yang mempengaruhi Demokratisasi di Myanmar. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 9(2).
- Rahmi. (2022). *Kudeta Militer Myanmar*. UIN Sunan Kali Jaga.

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Alfabeta.
- UNDP. (2021). *COVID-19, Coup d'Etat and Poverty: Compounding Negative Shocks and Their Impact on Human Development in Myanmar*. United Nations Development Programme.
- UNDP. (2022a). *Our mission, our goals, our mandate*. United Nations Development Programme.
- UNDP. (2022b). *Spotlight in Rakhine*. Express Adobe.
- UNDP. (2022c). *UNDP Support reaches 1 million vulnerable people*. Express Adobe.
- Widigdo, T. D. T., & Rofii, M. S. (2022). Analisis Kerentanan Ekonomi Myanmar Pasca Kudeta Militer di Tahun 2021. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12).
- Yangon. (2022). *Pandemic and political crisis could result in half of Myanmar's population living in poverty by 2022, UNDP says*. United Nations Development Programme.